

## Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Terjadi di Wilayah DKI Jakarta, Luhut: Hati-hati

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hampir seluruh daerah di DKI Jakarta alami tren kenaikan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir.

Hal ini diungkap Luhut dalam konferensi pers evaluasi minggu PPKM yang ditayangkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/11).

"Di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hampir semuanya trennya adalah naik (kasus Covid-19). Jadi saya mohon kita semua hati-hati," ujar Luhut.

Namun, Luhut tidak menjelaskan secara rinci berapa persentase kenaikan kasus positif Covid-19 yang dicatat pemerintah. Terjadinya kenaikan kasus Covid-19 di beberapa daerah karena mobilitas masyarakat juga meningkat. Hal ini justru perlu diwaspadai, masyarakat jangan sampai lengah menerapkan protokol Kesehatan (Prokes) dengan menerapkan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak dengan orang lain.

Selain di DKI Jakarta, Luhut juga mengungkapkan bahwa di seluruh Jawa-Bali, ada 43 kabupaten/kota mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 selama tujuh hari terakhir. Oleh karenanya, pemerintah akan mengum-

pulkan 43 kabupaten/kota tersebut untuk melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut pun mengungkapkan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus terjaga pada kondisi yang terkendali. Untuk tingkat penularan kasus Covid-19 di Jawa berada pada angka 0,93 persen. Kondisi itu menurut Luhut mengindikasikan pandemi di Indonesia saat ini terkendali. Sementara itu, tingkat penularan Covid-19 di Bali sebesar 0,97 persen.

"Tadi kita juga dapat laporan dari epidemiolog kita bahwa tingkat kematian, jumlah pemakaman itu sudah sama (kondisinya) dengan sebelum pandemi," tambah Luhut.

Kasus Covid-19 di Tanah Air, belakangan ini terus menurun. Seiring dengan itu, mobilitas masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini justru perlu diwaspadai, masyarakat jangan sampai lengah menerapkan protokol Kesehatan, terutama memakai masker. Apalagi dalam beberapa hari ini belakangan ini terjadinya tren kenaikan kasus Covid-19 di 131 Kabupaten/Kota dalam.

Data Kemenkes per Minggu (7/11) mencatat total sebanyak 143.545 kasus kematian. Penambahan kasus kematian hari itu hanya 11 kasus. Sementara penambahan kasus positif sebanyak 444, total kasus konfirmasi menjadi 4.248.165. ■ mar

## Jenderal Andika Perkasa Bicara soal Penggantinya sebagai KSAD

JAKARTA (IM) - DPR telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsyal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki pensiun. Seiring dengan itu, publik pun bertanya-tanya siapa yang dipilih sebagai KSAD?

Diketahui, sebelum dicalonkan sebagai Panglima TNI, Andika menduduki jabatan orang nomor satu di matra angkatan darat (AD) tersebut.

Menanggapi soal calon pengganti dirinya sebagai KSAD, Andika pun langsung menjawab serbuan pertanyaan dari awak media usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11).

Andika menegaskan bahwa penunjukkan calon KSAD bukanlah kewenangannya. Namun merupakan hak Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nama (calon KSAD) yang milih nanti Presiden," kata Andika.

Jenderal bintang empat itu berjanji, setelah resmi dilantik sebagai Panglima TNI, Andika akan menyampaikan lebih lanjut ihwal sosok yang akan mengisi kursi KSAD.

"Nanti setelah ada resminya baru, saya gak mau mendahului. Nanti disangka geer, kan memang bukan kewenangannya," tutup Andika.

Sebelumnya nama Panglima Komando Strategis An-

gkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Duding Abdurachman disebut-sebut akan mengisi jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sepeninggal Jenderal Andika Perkasa.

Untuk diketahui, Panglima TNI sebelumnya menunjuk Duding sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen Eko Margiyono yang diangkat menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Duding juga sempat memimpin Akademik Militer pada periode 2018 hingga 2020.

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon beberapa waktu lalu menyebut Duding Abdurachman akan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang naik menjadi Panglima TNI.

"Insha Allah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Duding Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi beberapa waktu lalu.

Selain itu, nama Duding juga lebih menonjol dibandingkan para jenderal bintang tiga TNI AD lainnya. Ada beberapa nama yang juga disebut menggantikan Andika Perkasa. Diantaranya, Wakasad Letjen TNI Bakti Agus Fadjar, Irenan Letjen TNI Benny Susianto, Koordinator Staf Ahli Kasad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi dan lain sebagainya. ■ han

## KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing Andi Putra 40 Hari

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Kuansing Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), hingga 40 hari ke depan.

Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

"Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka AP dkk untuk masing-masing selama 40 hari kedepan, terhenti mulai tanggal 8 November 2021 s/d 17 Desember 2021. Penandatanganan berita acara penahanan dimaksud telah dilakukan pada Jumat (5/11/2021)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11).

Andi Putra bakal ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Perpanjangan penahanan dimaksud karena kebutuhan proses penyidikan. Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik masih terus berlanjut dengan mengendahkan pemanggilan saksi-saksi disertai penyitaan berbagai

bukti yang terkait perkara ini," ucap Ali.

Bupati Kuansing Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing.

Andi Putra diduga telah menerima suap Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati keduanya.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. ■ mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## RAKER MENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Suasana rapat kerja antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan pandemi COVID-19 dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat, alat kesehatan, vaksin, dan tenaga medis, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat.

# KPK Dalam Peran Azis Syamsuddin Terkait Pengurusan DAK Lampung Tengah

KPK memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui peran eks Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dalam pengurusan DAK Kabupaten Lampung Tengah pada 2017.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam pengurusan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, pada 2017. Terkait hal itu, KPK telah memeriksa mantan Kepala Dinas (Kadis)

Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman, pada Jumat (5/11).

"Saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan peran tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dalam pengurusan pengajuan dana DAK (dana alokasi khusus) untuk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (8/11).

Selain eks Kadis Bina Marga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bina Marga Lampung bernama Supranowo, Andi Kadarisman dan Indra Erlangga juga diperiksa KPK. Kemudian, Kepala Sub Bagian Rekonstruksi, BPBD Kabupaten Lampung Tengah, An Riyanto dan Swasta/Direktur CV Tetyan Konsultan, Diryus Hartawan. Sebelumnya, Ketua KPK Firlil Bahuri menjelaskan, kasus yang menjerat Azis berawal

ketika politisi Partai Golkar itu menghubungi mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju pada Agustus 2020. Tujuannya untuk meminta tolong mengurus kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado. Kasus tersebut saat itu sedang diselidiki KPK.

Untuk diketahui, Robin kini sudah diberhentikan KPK setelah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi penanganan perkara di KPK. Selanjutnya, Robin menghubungi Maskur Husain seorang pengacara untuk mengurus dan mengawal kasus tersebut. Setelah itu, Maskur Husain menyampaikan kepada Azis dan Aliza untuk masing-masing menyiapkan sejumlah Rp 2 miliar.

Pemintaan sejumlah uang tersebut yang kemudian disetujui Azis. Uang lantas ditransfer Azis ke rekening Maskur secara bertahap. Masih di bulan Agustus 2020, Robin juga diduga datang menemui Azis di rumah dinas di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang, kali ini tunai. Uang diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 100.000 dollar AS atau Rp 1,42 miliar, 17.600 dollar Singapura (Rp 185 juta) dan 140.500 dollar Singapura (Rp 1,48 miliar).

"Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP (Stepanus Robin Pattuju) dan MH (Maskur Husain) ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain," kata Firlil dalam konferensi pers, Sabtu (25/9).

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 Miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 Miliar," ucapnya. ■ han

## Ketua Fraksi PDIP Utut Emosi, Tunjuk-tunjuk Anggota Fraksi PKS

JAKARTA (IM) - Di pengujung Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPR Puan Maharani, tak mengubris interupsi yang diajukan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes.

"Pimpinan, mohon maaf saya minta waktu. Pimpinan, saya (anggota) A-432," kata Fahmi di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Namun, Puan justru melanjutkan untuk menutup Rapat Paripurna, tanpa menggubris sedikit pun keinginan interupsi itu.

Karena kesal, Fahmi menyinggung soal Puan yang mau jadi calon presiden (capres). "Bagaimana mau jadi capres," tukasnya.

Ternyata ucapannya itu membuat marah politisi PDIP. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto bersama beberapa anggota Fraksi PDIP lainnya nampak menghampiri meja Fahmi. Secara samar, Utut menyampaikan agar Fahmi jangan menyinggung soal capres sembari menunjuk-nunjuk Fahmi.

Nampak juga Anggota Fraksi PKS lainnya, Almuzamil Yusuf menengahi Fahmi dan Utut, sehingga tidak sampai terjadi pertikaian yang berkepanjangan. ■ han

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utara, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat, Telp.021-5825868-69							
PENGUMUMAN							
No.214/Peng-31.73.HP.02.03/XI/2021							
Sehubungan dengan akan diujukannya permohonan hak atas tanah seperti tersebut dibawah ini dan untuk memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan azas publisitas sebagaimana Undang-Undang No.25 Tahun 2009 dan berpedoman pada Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 52 ayat (2), maka dengan ini diumumkan sebagai berikut :							
No.	NAMA DAN ALAMAT PEMOHON	LETAK TANAH JL.No.RTRW, KEL.,KEC.	TANGGAL	NOMOR	LUAS (m <sup>2</sup> )	SURAT PEROLEHAN TANAH DARI PEMOHON	KETERANGAN
1							
a.	ENDANG PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat Jalan Kayu Manis VIII No.15 RT.015 RW.008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Jalan Kampung Asem RT.002 RW.05, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	03-09-2019	2041.PBT.2019 NIB.09030601.12580	1.979	1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.233/HGB/DA/74 tanggal 23-07-1974, memutuskan serta menetapkan bahwa tanah-tanah hak milik adat yang nomor girok luas dan letaknya sebagaimana diuraikan dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini (Gambar Situasi tgl. 3-1-1974) adalah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan diberikan Hak Guna Sembunyi kepada PT. JAMES HARDIE INDONESIA berkedudukan di Jakarta atas tanah seluas 353.761 M <sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Jakarta Tangerang, Desa Perisagea, Kecamatan Batuceper, Tangerang, Jawa Barat.	Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang dari PS PANIT I u. b. KA SPKT bertindak atas nama Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat Nomor : 2338/B/IX/2021/Res Jak. Bar/SPKT tanggal 03-09-2021, diterangkan telah kehilangan 1 (satu) Buah Asli Surat Letter C No.C.760 Persil 109 Blok D.II dan Asli Surat Pelepasan Hak No.73/PH/73. Dengan Luas Tanah Lebih Kurang 1.979 M <sup>2</sup> (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi). Yang terletak di Rt.002/005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dilaporkan oleh ROYANIH BIN H. SOLO telah hilang di sekitar lokasi Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
b.	ENDANG PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat Jalan Kayu Manis VIII No.15 RT.015 RW.008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Jalan Kampung Asem RT.002 RW.05, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	03-09-2019	2038.PBT.2019 NIB.09030601.12578	745	3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. "JAMES HARDIE INDONESIA", No.35 tanggal 30-04-1986 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-1682-HT.01.04.TH.88 tanggal 29-02-1988, kemudian Perseroan Terbatas JAYA HARFLEX INDONESIA, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-79007.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28-10-2008.	Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Surat/Barang dari PS PANIT I u. b. KA SPKT bertindak atas nama Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat Nomor : 2337/B/IX/2021/Res Jak. Bar/SPKT tanggal 03-09-2021, diterangkan telah kehilangan 1 (satu) Buah Asli Surat Letter C No.1249 Persil 100 Blok S.III dan Asli Surat Pelepasan Hak No.1458 Persil 103 Blok S.III dan Asli Surat Pelepasan Hak No.23/PH/73. Dengan Luas Tanah Lebih Kurang 745 M <sup>2</sup> (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi). Yang terletak di Rt.002/005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dilaporkan oleh ROYANIH BIN H. SOLO telah hilang di sekitar lokasi Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
c.	ENDANG PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat Jalan Kayu Manis VIII No.15 RT.015 RW.008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Jalan Kampung Asem RT.002 RW.05, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	03-09-2019	2040.PBT.2019 NIB.09030601.12579	308	4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Porosga tanggal 10-09-2018 Nomor : 593/120-Agr/Pg/IX/2018, memberikan keterangan permohonan hak atas tanah Negara yang diajukan Ir. YOGI PRATOMO WIDHIARTO selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES (Pemohon), berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Porosga Nomor : 593/120-Agr/Pg/IX/2018 tanggal 10-09-2018 atas 3 bidang tanah masing-masing seluas 388 M <sup>2</sup> , 94 M <sup>2</sup> , 3.158 M <sup>2</sup> yang terletak di RT.002 RW.05, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ketiga luas bidang tanah tersebut tercatat kuitipannya di Kantor Kelurahan Porosga dan secara fisik tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikan haknya maupun kepemilikan batas-batas tanahnya.	Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterial cukup 19-02-2020, pemohon menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain.
						5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Semanan tanggal 12-11-2019 No.562/1711.01, memberikan keterangan permohonan hak atas tanah Negara yang diajukan Ir. YOGI PRATOMO WIDHIARTO selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES (Pemohon), berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Porosga Nomor : 593/120-Agr/Pg/IX/2018 tanggal 10-09-2018 atas 3 bidang tanah masing-masing seluas 388 M <sup>2</sup> , 94 M <sup>2</sup> , 3.158 M <sup>2</sup> yang terletak di RT.002 RW.05, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ketiga luas bidang tanah tersebut tercatat kuitipannya di Kantor Kelurahan Porosga dan secara fisik tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikan haknya maupun kepemilikan batas-batas tanahnya.	Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterial cukup 19-02-2020, pemohon menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain.

Kepada siapa yang keberatan atas permohonan hak atas tanah tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diumumkan dalam surat kabar dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikannya.

Keberatan-keberatan yang diajukan setelah lewat waktu tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan hak atas tanahnya akan dilanjutkan prosesnya sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku.

Jakarta, 1 November 2021  
A/n Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran  
td  
Nono Sukirno, A.PtNh., M.M.  
NIP.19861003.198603.1.001